

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
<https://osf.io/preprints/juwxn/>
- Agasi, A. P., Sitorus, A. A. N. S., Prasalengga, A., Inayati, A., Indriyani, A. F., Dewi, C. P., Sari, E. Y. J. M., Kirana, M. C., Fauzia, S. N., & Rumah, P. P. (2020). *Strategi Pemberantasan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
<https://eprints.untirta.ac.id/23453>
- Caesar, M. R., Listania, T., & Undang, G. (2020). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Neo Politea*, 1(2), 1–16.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), 01–01.
- Easter, L., Yaqin, M. A., Fatah, A., Purba, L., & Paradisha, N. Z. (2014). *Studi tentang penerapan pasal gratifikasi yang dianggap suap pada Undang-Undang Tipikor*. <https://www.neliti.com/publications/45371/studi-tentang-penerapan-pasal-gratifikasi-yang-dianggap-suap-pada-undang-undang>
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., Farhani, S., Rifa'i, A., & Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, MA: Pitman.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*, 4(1), 41–54.
- Hamson, Z., & Makkah, H. M. (2021). *Membedah Anatomi Korupsi*. Penerbit NEM.
- Hamzah, Andi, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan.(Jakarta: Akademika Presindo, 1984)
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Moha, I. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*.
- Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(2), 59–73.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Publisher. <http://eprints.itn.ac.id/13583/>
- Oktaviani, A. T., Prameswari, M., Maharani, N., Saputri, A. M. K. D., Putri, I. L., Sagita, A., Aryanty, Y. M., Ismiyati, E., Meliana, S. D., & Rumah, P. P.

- (2022). *Korupsi yang Membudaya di Indonesia: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Paruntu, D. D. (2014). Tolok ukur penegakkan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi. *Lex Crimen*, 3(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/4544>
- Perekonomian, K. K. B. (2022). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)*.
- P. Siagian Sondang 2002, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pasalog, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku organisasi*. Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Steers, M. R., Mowday, R. T., & Shapiro, D. L. (2004). *Introduction To Special Topic Forum The Future Of Work Motivation Theory. Academy of Management Review*.
- Steers, R. M. (1980). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
https://digilib.unigres.ac.id/index.php/index.php?p=show_detail&id=966&keywords=
- Sukiyat, H. (2020). *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Jakad Media Publishing.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI
- Umanailo, M. (2003). Paradigma Konstruktivis. *Paradigma*, 75.

Jurnal:

Abbas, K. (2021). *Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-handed Catch Operation on Bribery Action. Jurnal Bina Praja*, 13(2), 319–329.

Amalia, W. O. Z. (2023). *Aspek-Aspek Psikologis Pengambilan Keputusan Korupsi (Studi Pada Terpidana Kasus Korupsi di Kabupaten Muna)*. Universitas Hasanuddin.

Astuti, F., Afrillah, M., Nurida, D. Y., Munawar, A. S., & Peirisal, T. (2022). Implementasi Kebijakan Simurp Komponen-B Upaya Peningkatan Efisiensi Irigasi Melalui Pendekatan Modernisasi Berbasis Partisipatif Di Kabupaten Subang (Studi Kecamatan Binong): Implementasi Kebijakan Simurp Komponen-B Upaya Peningkatan Efisiensi Irigasi Melalui Pendekatan Modernisasi Berbasis Partisipatif Di Kabupaten Subang (Studi Kecamatan Binong). *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 7(1).

Balya, M. (2024). *Penetapan Status Barang Sebagai Gratifikasi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia* [Phd Thesis, Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/67753/>

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.

Bukhari, B. (2022). *Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/13511>

- Faisal, A. A. (2018). Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(4).
- Gubali, A. (2013). Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3088>
- Gunawan, H. (2022). *Pendidikan karakter: Konsep dan implementasi* (Vol. 1). Cv. Alfabeta. https://etheses.uinsgd.ac.id/69084/1/Pendidikan_Karakter-Heri%20Gunawan.pdf.pdf
- Handoko, B., & Budiyo, B. (2017). Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru (Di Kalimantan Selatan) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(1).
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/negara/article/download/287/193>
- Hasibuan, M. S., Kusno, K., & Toni, T. (2023). *Exciency and Authority Chairman of the Corruption Eradication Commission for Bribery and Gratification Cases of the Governor of Papua According to Law Number 30 of 2002 Juncto Law Number 19 of 2019 Concerning the Corruption Eradication Commission. Journal of Social Research*, 2(5), 1531–1537.
- Irmawan, A. (2023). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 50–84.
- Iskandar, I. S. (2023). Konsepsi Gratifikasi sebagai Korupsi bagi Pejabat Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/21863>

- Karwur, D. D. (2024). Penegakan Hukum Pp N0. 43 Tahun 2018 Terhadap Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Lex Privatum*, 14(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58418>
- Kusuma, R. A. (2023). *Impelementasi Perda No 18 Tahun 2017 Tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Kota Garut* [PhD Thesis, Universitas Siliwangi].
<http://repositori.unsil.ac.id/8694/>
- Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1–16.
- Lerah, R. M. (2018). Tata Cara Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara Menurut Peraturan Kpk No. 02 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 7(5).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20552>
- Mampu, D. K. T., & Maula, N. I. (N.D.). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (Kjmu) Sebagai Upaya Peningkatan Akses Dan Kesempatan Belajar Di Ptn Bagi Mahasiswa*. Retrieved November 3, 2024,
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 155–173.
- Pratama, A., Danil, E., & Fendri, A. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(1), 1659–1668.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/68/61>
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/144>
- Rada, A. M., & Marsaoly, S. (2019). Optimalisasi Pelaporan Gratifikasi Di Unit Pengendalian Gratifikasi (Upg) Kota Ternate Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Humano: Jurnal Penelitian*, 10(2), 437–446.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rompas, C. M. (2018). Kajian Hukum Mekanisme Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara (Peraturan Kpk No. 2 Tahun 2014). *Lex Administratum*, 6(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24525>
- Ronaldo, R., Subagja, A. D., & Suparman, A. (2020). Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
<http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/925>

- Rusadi, F. A. R. P., Sukinta, S., & Baskoro, B. D. (2019). Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1145–1165.
- Santoso, T. (2013). Menguak relevansi ketentuan gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 402–414.
- Sastiya, N. (2018). Efektivitas operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. *Universitas Islam Jakarta, Syarif Hidayatullah*.
- Sitorus, E. M. S. (2023). *Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mencegah Gratifikasi (Studi Di Kantor Kepala Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara)* [PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26395/>
- Sofiana, N. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penghulu Yang Menerima Gratifikasi Dari Pihak Keluarga Pengantin* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/25414/>
- Umam, I. K. (n.d.). *Efektivitas operasi tangkap tangan komisi Pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi* [B.S. thesis]. Retrieved October 27, 2024, from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43791>
- Usman, R., Hunawa, A., & Rahim, A. (2024). Gratifikasi Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Islam. *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, 1(01), 57–78.

Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230.

Widayati, D. K., & Ginting, R. (2014). Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 199–208.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang (1999), *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang (2001), *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang (2002), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (2014), *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi*

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (2015), *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi*